

Lampiran 1

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **PROFESIONALISME APARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

#### **DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**(Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)**

#### **Kualitas keahlian dan kewenangan**

1. Bagaimanakah bentuk keahlian bidang pekerjaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam penertiban pedagang kaki lima?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keahlian bidang pekerjaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam penertiban pedagang kaki lima?
3. Bagaimanakah bentuk kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung melaksanakan penertiban pedagang kaki lima?
4. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung melaksanakan penertiban pedagang kaki lima?

#### **Sikap mental dalam bentuk komitmen**

5. Bagaimanakah sikap mental anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam penertiban pedagang kaki lima?

6. Bagaimanakah proses pembentukan sikap mental anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam penertiban pedagang kaki lima?
7. Bagaimanakah komitmen anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam penertiban pedagang kaki lima?
8. Bagaimanakah upaya mempertahankan komitmen anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam penertiban pedagang kaki lima?

**Tolak ukur efektivitas/efisiensi kinerja**

9. Bagaimanakah ukuran efektivitas pencapaian hasil kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam penertiban pedagang kaki lima?
10. Bagaimanakah ukuran efisiensi pencapaian hasil kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam penertiban pedagang kaki lima?
11. Apakah selama ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung telah melaksanakan penertiban pedagang kaki lima secara efektif? Berikan contohnya
12. Apakah selama ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung telah melaksanakan penertiban pedagang kaki lima secara efisien? Berikan contohnya

**Prosedur kerja**

13. Bagaimanakah prosedur kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam penertiban pedagang kaki lima?
14. Apakah setiap Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung taat melaksanakan prosedur kerja penertiban pedagang kaki lima?

15. Bagaimana upaya untuk meningkatkan kedisiplinan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung terhadap prosedur kerja penertiban pedagang kaki lima?
16. Bagaimana jika Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung kurang atau tidak disiplin terhadap prosedur kerja penertiban pedagang kaki lima?

**MATRIK HASIL WAWANCARA**

**PROFESIONALISME APARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**(Studi Kasus pada Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning  
Bandar Lampung)**

No	Informan	Jawaban
<b>Kualitas Keahlian dan Kewenangan</b>		
	Cik Raden	“Pelaksanaan kegiatan atau program penertiban Pedagang Kaki Lima dapat berjalan efektif apabila petugas memiliki kualitas keahlian dan kewenangan yang jelas serta berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai”
	Herman Karim	“Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung memiliki berbagai kewenangan terkait dengan upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban umum. Pelaksanaan berbagai kewenangan tersebut merupakan suatu bentuk implementasi dari tugas dan fungsi Satpol PP”
	Fadli Gunawan	“Operasi Penertiban di lapangan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja”

	Agus Franata Siregar	”Pelaksanaan wewenang Satpol PP dalam penertiban PKL hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak mengutamakan kekerasan, sebab pada dasarnya PKL ini bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari”
	Suratmin	“Kami menghargai kewenangan yang dimiliki dalam Penertiban PKL yang mengganggu ketertiban umum, tetapi caranya harus dilaksanakan dengan baik, jangan merusak lapak-lapak milik pedagang”
	Sazali	“Sebaiknya para Satpol PP itu menertibkan PKL dengan cara-cara yang tidak merusak, sehingga tidak menyebabkan kerugian kami sebagai PKL yang mencari nafkah demi anak istri”
<b>Sikap Mental dalam Bentuk Komitmen</b>		
	Cik Raden	“Sikap mental dan komitmen petugas dalam penertiban PKL adalah untuk memelihara keindahan dan ketertiban kota serta meminimalisasi terjadinya gejolak atau perlawanan dari PKL, sehingga pendekatan dalam penertiban tersebut dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi”
	Herman Karim	“Sikap mental dan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung sudah jelas yaitu melaksanakan dan menegakkan Perda demi terciptanya ketentraman dan

		ketertiban umum di Kota Bandar Lampung ini. Dan hal tersebut mendapatkan legitimasi dari Pemerintah Kota”
	Fadli Gunawan	“Komitmen kami adalah melaksanakan penegakan Perda terhadap pihak-pihak yang melanggar Perda tersebut, jadi sebenarnya kami ini hanya pelaksana di lapangan dan menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada”
	Agus Franata Siregar	Pejabat kota dan kaum elite lokal yang lain biasanya memandang PKL sebagai gangguan yang membuat kotor dan tidak rapi, menyebabkan kemacetan lalu lintas, pembuangan sampah di sembarang tempat, gangguan para pejalan kaki, saingan pedagang toko yang tertib membayar pajak, serta penyebar penyakit lewat kontak fisik dan penjualan makanan yang kotor
	Suratmin	“Sebenarnya kami mengerti bahwa Satpol PP itu hanya menjalankan perintah dari Pemerintah Kota dalam melakukan penertiban PKL, tetapi hendaknya pemerintah juga memikirkan nasib kami yang bekerja dan mencari nafkah dari usaha sebagai PKL ini”
	Sazali	“Sebagai PKL, kami tidak menuntut banyak hal kami hanya menginginkan kepastian dalam berusaha, janganlah kami ini terus diacak-acak, seperti orang yang tidak punya hak untuk mencari nafkah saja”

<b>Tolok Ukur Efektivitas/Efisiensi Kerja</b>		
	Cik Raden	“Bagi saya pelaksanaan program dapat dinyatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam arti kami dapat menertibkan Pedagang Kaki Lima sehingga kebersihan dan keindahan Kota Bandar Lampung dapat tercipta”
	Herman Karim	“Tolok ukur efektivitas atau efisiensi kinerja Satpol PP adalah keberhasilan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, khususnya Perda yang berkaitan dengan keindahan dan ketertiban Kota”
	Fadli Gunawan	“Penertiban PKL dalam hal ini merupakan salah satu usaha Pemerintah Kota Bandar Lampung dilaksanakan dengan pembinaan. Pembinaan PKL merupakan usaha yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap PKL dengan jalan membina PKL.”
	Agus Franata Siregar	Perkembangan PKL semakin hari semakin bertambah sehingga dianggap membuat permasalahan kemacetan lalu lintas dan kesemrawutan kota. Hal inilah yang perlu diluruskan sebab PKL selama ini hanya dijadikan sebagai kambing hitam”
	Suratmin	“Jika Pemerintah Kota hendak memindahkan tempat usaha kami, maka harus ada jaminan bahwa tempat usaha yang baru tersebut memiliki pembeli yang bagus. Jangan sampai kami dipindahkan tetapi tidak ada pembelinya nanti”

	Sazali	“Harus ada kepastian bahwa kami dapat bekerja dan berusaha dengan tenang tanpa khawatir digusur atau dibongkar paksa oleh petugas Satpol PP, karena hal tersebut jelas sangat merugikan kami”
<b>Prosedur Kerja</b>		
	Cik Raden	“Dalam tahapan preemtif, pihak Satuan Polisi Pamong Praja berupaya seoptimal mungkin untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam hal penertiban PKL, oleh karena itu setiap personil harus memahami dengan benar makna perencanaan penertiban PKL di Pasar Bambu Kuning”
	Herman Karim	“Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penertiban PKL yang melanggar Perda yaitu dengan melakukan penyuluhan, pembinaan atau pendekatan preventif untuk meningkatkan kesadaran para pedagang bahwa lokasi tempatnya berjualan bukan peruntukannya, menyampaikan teguran baik secara lisan atau tertulis”
	Fadli Gunawan	“Tujuan kegiatan penyuluhan adalah untuk menambah pengetahuan para Pedagang Kaki Lima dan menyadarkan mereka bahwa tempat mereka berjualan merupakan lokasi yang dilarang Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk berjualan. Penyuluhan dan pembinaan kepada PKL dilakukan secara langsung atau bersifat insidental.”



	Agus Franata Siregar	”Penertiban PKL berkaitan dengan permasalahan ekonomi para PKL, oleh karena itu penertiban PKL harus selaras dengan upaya mengembangkan Kota Bandar Lampung sebagai pusat jasa dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan, tujuan misi ini antara lain adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya ekonomi kerakyatan”
	Suratmin	“Kalau Satpol PP hendak melakukan penertiban, sebaiknya didahului oleh adanya surat teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis/surat kepada PKL yang dianggap melanggar. Jadi jangan langsung main gusur dan angkut saja”
	Sazali	“Kepada para PKL yang dianggap melanggar, sebaiknya diberikan surat teguran terlebih dahulu, jadi ada perbaikan sebelum benar-benar dinyatakan bersalah”

